

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak Januari 2001, desentralisasi fiskal yang efektif telah memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan menerapkan pengelolaan keuangan mereka sendiri (Mardiasmo, 2021). Ketika beberapa bidang pemerintahan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pengelolaan keuangan ini menjadi lebih baik (Rukmini, 2022). Dengan desentralisasi, diharapkan pencapaian sasaran pembangunan dapat dipercepat, tentunya dibutuhkan anggaran sebagai alat perencanaan pembangunan yang sangat strategis untuk mencapai sasaran pembangunan. Untuk mencapai sasaran pembangunan pada suatu wilayah, dibutuhkan strategi dan kebijakan ekonomi yang fokus kepada sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut. Sektor strategis dan potensial tersebut adalah dari sektor riil, finansial dan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu evaluasi terhadap hasil kinerja pemerintah daerah juga sangat penting untuk dilakukan secara berkala, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai tugas pemerintah daerah.

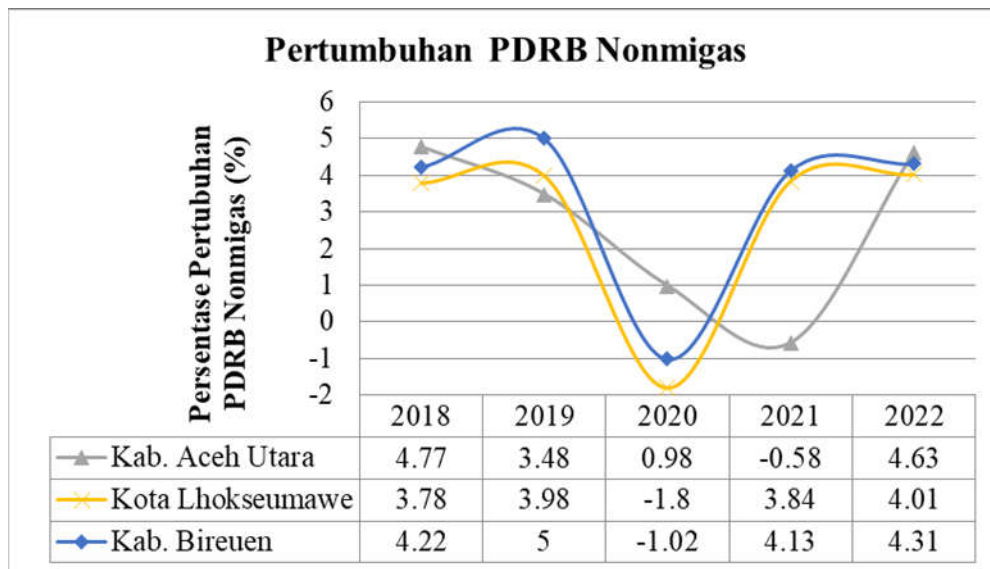
Penelitian ini berkonsentrasi pada tiga wilayah di Aceh yaitu pada Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang kinerja ekonomi daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat perbedaan antara ketiga kabupaten/kota tersebut. Dalam konteks Indonesia, kinerja ekonomi setiap daerah

dan kinerja keuangan pemerintah daerah masing-masing berkorelasi satu sama lain dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah (Setiani, 2022).

Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen memiliki karakteristik ekonomi dan demografi yang berbeda. Sejak lama, wilayah ini telah memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi Aceh dan Indonesia (Yusuf, 2023). Meningkatkan kinerja ekonomi dan keuangan pemerintah daerah masih menjadi tantangan. Setiap sektor ekonomi di daerah harus meningkatkan kinerjanya untuk mendorong pembangunan lokal.

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dan kita dapat mengetahui hasil dari kegiatan pemerintahan tersebut melalui kinerja ekonomi daerah dan kinerja keuangan ekonomi daerah. Untuk mengetahui kinerja ekonomi daerah pada suatu wilayah dapat diketahui dengan Indeks Kinerja Ekonomi Daerah. Beberapa cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melalui analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.

Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKED) digunakan untuk mengetahui Kinerja Ekonomi Daerah di Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kab. Bireuen pada tahun 2018-2022. Kinerja Ekonomi Daerah (IKED) terdiri dari beberapa indikator yaitu pertumbuhan PDRB nonmigas, pertumbuhan PDRB perkapita, rasio PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi, dan angka kemiskinan.



**Gambar 1.1. Pertumbuhan PDRB Nonmigas Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kab. Bireuen Tahun 2018-2022**

Gambar di atas menjelaskan tentang pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nonmigas di tiga wilayah di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen, selama periode lima tahun dari 2018 hingga 2022.

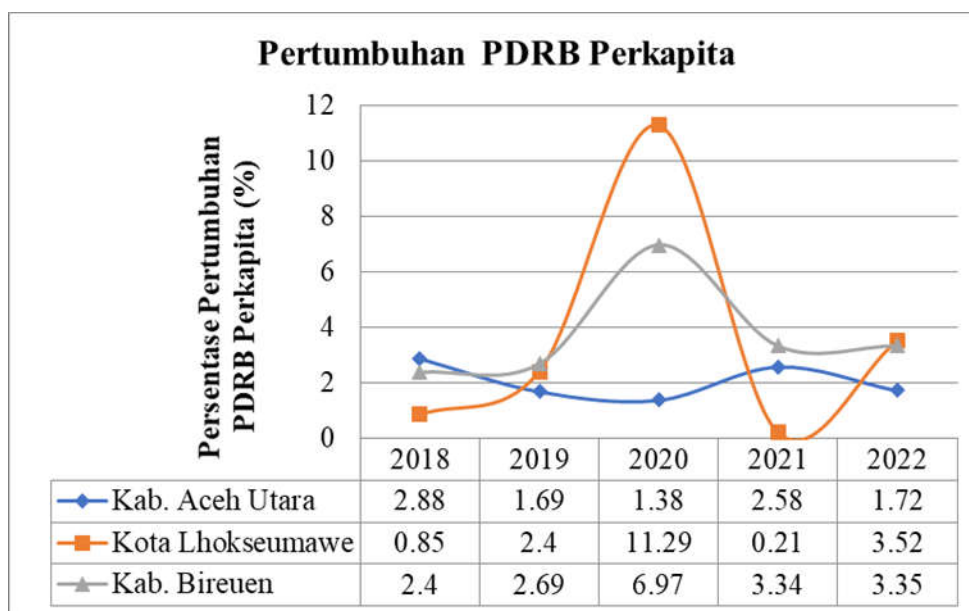
Kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi selama lima tahun tersebut. Setelah mencatatkan pertumbuhan positif pada 2018, angka tersebut menurun pada 2019 dan bahkan mencatatkan pertumbuhan negatif pada 2020, sebelum kemudian pulih pada 2021 dan 2022.

Sementara itu, Kota Lhokseumawe juga menghadapi tantangan ekonomi dengan pertumbuhan yang melambat pada 2020. Namun, kota tersebut berhasil pulih dengan cepat pada 2021 dan 2022, mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Kabupaten Bireuen menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil selama periode lima tahun tersebut, dengan angka yang cenderung meningkat dari

tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 ketika mengalami sedikit penurunan. Namun, kabupaten ini berhasil pulih pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan ketiga wilayah tersebut mengalami tantangan dan pemulihan dalam pertumbuhan PDRB Nonmigas selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun tersebut berada pada tingkat yang relatif stabil. Pada tahun 2018, pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 2.88 persen, dan angka ini menurun sedikit pada tahun 2019 menjadi 1.69 persen. Namun, pertumbuhan tersebut meningkat lagi pada tahun 2020 dan 2021, mencapai 1.38 persen dan 2.58 persen berturut-turut. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB per kapita di kabupaten tersebut mencapai 1.72 persen, menunjukkan pemulihan yang stabil dalam aktivitas ekonomi per-orang di wilayah tersebut.



**Gambar 1.2. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kab. Bireuen Tahun 2018-2022**

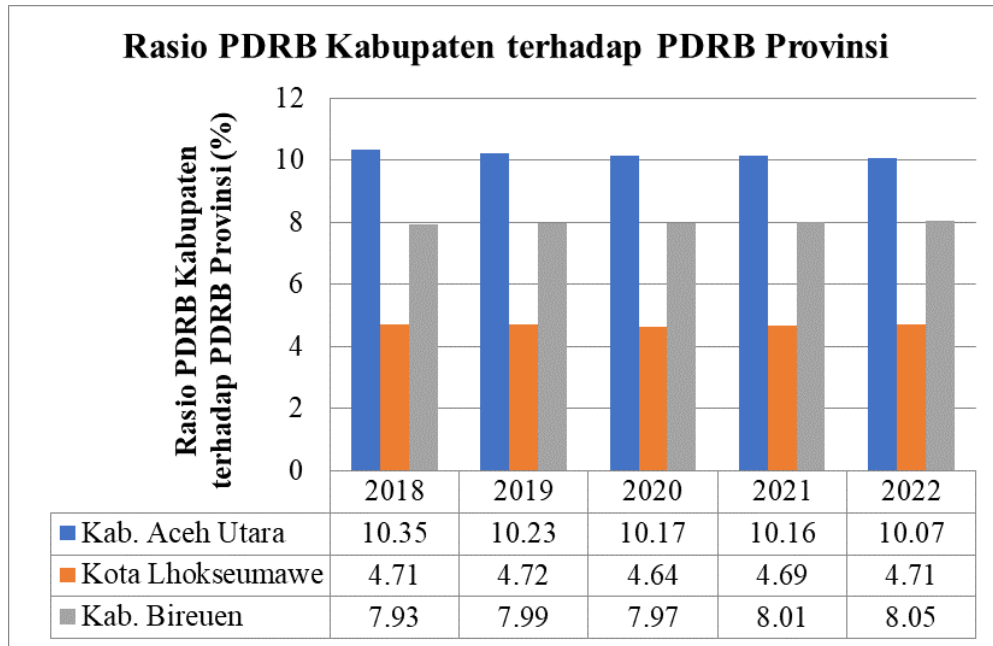
Gambar di atas menjelaskan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di tiga wilayah di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen, selama periode lima tahun dari 2018 hingga 2022.

Sementara itu, Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih signifikan selama periode lima tahun tersebut. Pada tahun 2018, pertumbuhan mencapai 0.85 persen, kemudian meningkat tajam pada 2019 menjadi 2.4 persen. Lalu, pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dalam pertumbuhan PDRB per kapita hingga mencapai 11.29 persen. Namun, di tahun 2021, pertumbuhan tersebut turun drastis menjadi hanya 0.21 persen. Pada tahun 2022, kota ini mengalami sedikit pemulihan dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 3.52 persen.

Kabupaten Bireuen menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita yang cenderung konsisten selama lima tahun tersebut. Pada tahun 2018, pertumbuhan mencapai 2.4 persen, dan naik sedikit pada tahun 2019 menjadi 2.69 persen. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan signifikan dalam pertumbuhan PDRB per kapita hingga mencapai 6.97 persen. Kemudian, pertumbuhan tersebut terus bertahan di angka yang hampir sama pada tahun 2021 dan 2022, dengan masing-masing 3.34 persen dan 3.35 persen.

Secara keseluruhan, data dalam tabel menunjukkan variasi pertumbuhan PDRB per kapita di ketiga wilayah tersebut selama lima tahun tersebut. Kabupaten Aceh Utara menunjukkan pertumbuhan yang stabil, sementara Kota

Lhokseumawe mengalami fluktuasi yang signifikan, dan Kabupaten Bireuen menunjukkan pertumbuhan yang relatif konsisten.



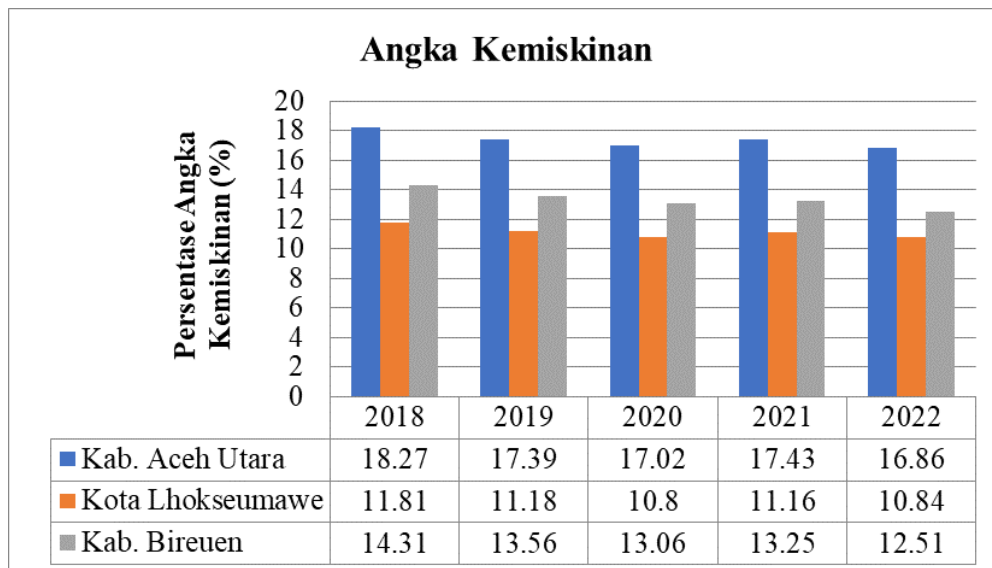
**Gambar 1.3. Rasio PDR Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi**

Gambar 1.3 di atas menjelaskan perbedaan pada persentase kontribusi ekonomi Rasio PDRB Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kab. Bireuen terhadap ekonomi total Provinsi Aceh pada tahun 2018-2022.

Rasio PDRB Kabupaten Aceh Utara terhadap PDRB Provinsi Aceh cenderung menurun secara perlahan, dimulai dari 10.35 persen pada tahun 2018 menjadi 10.07 persen pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi Kabupaten Aceh Utara terhadap ekonomi total Provinsi Aceh mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Sementara itu, Kota Lhokseumawe menunjukkan stabilitas yang lebih besar dalam rasio PDRB selama periode lima tahun tersebut. Rasio PDRB Kota Lhokseumawe terhadap PDRB Provinsi Aceh hampir tidak berubah selama periode lima tahun, tetap berada di sekitar 4.7

persen. Kabupaten Bireuen juga menunjukkan stabilitas dalam rasio PDRB selama lima tahun tersebut. Rasio PDRB Kabupaten Bireuen terhadap PDRB Provinsi Aceh berkisar antara 7.93 persen pada tahun 2018 hingga 8.05 persen pada tahun 2022, menunjukkan sedikit kenaikan yang relatif konsisten.

Secara keseluruhan kontribusi ekonomi pada Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen terhadap ekonomi Provinsi Aceh relatif stabil, meskipun mengalami fluktuasi kecil selama lima tahun tersebut.



**Gambar 1.4. Angka Kemiskinan Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kab. Bireuen Tahun 2018-2022**

Gambar 1.4 di atas berisi data tentang Angka Kemiskinan di tiga wilayah di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen, selama periode lima tahun dari 2018 hingga 2022.

Angka Kemiskinan menggambarkan persentase atau proporsi penduduk di suatu wilayah yang berada dalam kondisi miskin, yaitu dengan pendapatan di

bawah garis kemiskinan. Ketiga wilayah menunjukkan angka kemiskinan yang cenderung menurun secara perlahan.

Pada tahun 2018, Kabupaten Aceh Utara memiliki angka kemiskinan sebesar 18.27 persen, sedangkan Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen memiliki angka kemiskinan masing-masing 11.81 persen dan 14.31 persen. Tren menurun terus berlanjut pada tahun 2019, dengan Kabupaten Aceh Utara mencatatkan angka kemiskinan sebesar 17.39 persen, Kota Lhokseumawe sebesar 11.18 persen, dan Kabupaten Bireuen sebesar 13.56 persen. Pada tahun 2020, semua wilayah mencatatkan angka kemiskinan yang lebih rendah lagi, yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan 17.02 persen, Kota Lhokseumawe dengan 10.8 persen, dan Kabupaten Bireuen dengan 13.06 persen. Tren penurunan tersebut tetap berlanjut pada tahun 2021, dengan Kabupaten Aceh Utara memiliki angka kemiskinan sebesar 17.43 persen, Kota Lhokseumawe sebesar 11.16 persen, dan Kabupaten Bireuen sebesar 13.25 persen. Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus menurun, yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan 16.86 persen, Kota Lhokseumawe dengan 10.84 persen, dan Kabupaten Bireuen dengan 12.51 persen.

Salah satu hal yang penting pada kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik, menurut Paat, Nangoi & Pusung (2019). Baik untuk provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah menetapkan mengenai APBD melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat diketahui Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 1.1.**  
**Pengangguran, Kemiskinan, Jumlah Penduduk, IPM, dan Luas Wilayah Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kab Bireuen Tahun 2022**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	IPM	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> /sq.km)
Kab. Aceh Utara	7	16.86	614,640	70.22	2711.5
Kota Lhokseumawe	9.15	10.84	191,396	78.04	136.49
Kab. Bireuen	4	12.51	443,874	73.16	1793.27

Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas persentase pengangguran antara ketiga kabupaten/kota penelitian terendah diraih oleh Kabupaten Bireuen kemudian disusul oleh Kabupaten Aceh Utara dan tertinggi di Kota Lhokseumawe. Tingkat pengangguran terbuka terendah diperoleh oleh Kabupaten Bireuen kemudian disusul oleh Kabupaten Aceh Utara, dan tertinggi pada Kota Lhokseumawe. Persentase penduduk miskin terendah diraih oleh Kota Lhokseumawe, kemudian Kabupaten Bireuen, dan tertinggi pada Kabupaten Aceh Utara. Kota Lhokseumawe dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kemudian dilanjutkan oleh Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara.

Data-data di atas memberikan gambaran umum mengenai Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kab. Aceh Utara. Namun dari kondisi tersebut perlu diketahui juga bagaimana dari sisi kinerja ekonomi dan kinerja keuangan

pemerintah. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah ini dan memberikan saran untuk peningkatan. Inti dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kinerja ekonomi daerah dan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, akan memberikan saran kepada pemerintah daerah tentang cara meningkatkan kinerja ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini peninjauan tentang kinerja ekonomi daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhoskeumawe, dan Kab. Bireuen akan dilakukan. Dan sebelumnya akan dilakukan dengan peninjauan pada beberapa indikator terkait. Indikator kinerja ekonomi daerah didasarkan pada pertumbuhan PDRB nonmigas, pertumbuhan pdrb perkapita, rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi, dan angka kemiskinan, sementara kinerja keuangan pemerintah daerah dievaluasi berdasarkan rasio kemandirian rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Penelitian ini menggunakan indikator seperti pertumbuhan PDRB nonmigas, pertumbuhan PDRB perkapita, rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB Provinsi, dan angka kemiskinan untuk menilai kinerja ekonomi. Output ekonomi setiap daerah (PDRB) adalah ukuran yang memberikan gambaran umum tentang sejauh mana aktivitas ekonomi berkembang di daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan perkembangan rata-rata pendapatan per-individu di

suatu daerah. Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi menunjukkan besarnya peran dari suatu daerah kabupaten/kota dalam menyumbang total PDRB provinsi. Angka kemiskinan menunjukkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di daerah tersebut.

Terdapat tiga rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur sejauhmana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan dan layanan dengan menggunakan pendapatan asli daerah, yang menunjukkan kemandirian fiskal mereka. Maka dapat diketahui juga sejauh mana pemerintah daerah mengandalkan sumber pendapatan internal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan eksternal seperti transfer dari pemerintah pusat, pinjaman, dan dana hibah. Rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang kuat untuk membiayai kegiatan operasional mereka tanpa tergantung pada pendapatan dari sumber eksternal. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai suatu target yang ditentukan yaitu besaran Penerimaan Asli Daerah (PAD). Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa baik pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan sumberdaya dalam mencapai tujuan pelayanan publik dan pembangunan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Waoma (2019) dengan judul “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif

dengan Analisis *Multivariate Analysis of Variance* (Manova). Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi sangat kurang, rasio ketergantungan daerah sangat baik, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik. Adanya perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Peringkat kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi adalah urutan pertama Kabupaten Nias disusul Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Pada rasio ketergantungan keuangan daerah ditempati secara berturut-turut oleh Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan terakhir Kabupaten Nias. Pada kemandirian keuangan daerah posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Nias selanjutnya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan mendalam tentang kinerja ekonomi dan keuangan pemerintah daerah di tiga kabupaten tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian diatas, berikut merupakan rumusan masalah penelitian:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja ekonomi daerah antara Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kab. Bireuen berdasarkan indeks kinerja ekonomi daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kab. Bireuen berdasarkan rasio kemandirian?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kab. Bireuen berdasarkan rasio efektivitas?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kab. Bireuen berdasarkan rasio efisiensi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan kinerja ekonomi daerah antara Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan indeks kinerja ekonomi daerah.
2. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan rasio kemandirian.

3. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan rasio efektivitas.
4. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan rasio efisiensi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memperluas literatur dalam konteks analisis perbedaan kinerja ekonomi dan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan topik yang sama. bagi peneliti yang ingin mengkaji mengenai masalah yang berkaitan di masa yang akan datang.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai kinerja ekonomi daerah serta kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen, serta pemerintah provinsi Aceh berkaitan dengan kinerja ekonomi daerah dan

kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran pemerintah daerah di tahun-tahun berikutnya. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja ekonomi dan keuangan daerah, sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu manajemen terutama manajemen keuangan khususnya pada kaitannya dengan manajemen keuangan daerah.